

**PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK PEMBIAYAAN DAERAH PADA DPPKAD
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Oleh:

Julio Yesaya Tampi¹

Herman Karamoy²

Inggriani Elim³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹juliotampi@yahoo.com

²h_karamoy@yahoo.com

³inggrianielim@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah pada Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas dan fungsi dalam menerapkan akuntansi pembiayaan yang bertujuan untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus. Akuntansi pembiayaan memiliki unsur penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 Lampiran II di Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dimana data disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara secara garis besar telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, terlihat dari telah dimunculkan di laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, sehingga telah dibuat pencatatan jurnalnya. Hanya saja terdapat kelemahan dalam data di laporan realisasi anggaran bahwa transaksi yang tercatat telah direalisasikan namun Pemda tidak menargetkan anggaran yang ditetapkan. Diperlukan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik untuk melakukan evaluasi dalam pencatatan laporan realisasi anggaran, dan seharusnya diperlukan penjelasan setiap entitas penerimaan maupun pengeluaran dalam catatan atas laporan kas.

Kata kunci: penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan

ABSTRACT

The implementation of region financial accounting in the government of regency Minahasa Tenggara has the duty and function to implement its financial accounting which is able to cover deficit nor utilize surplus. Financial accounting has the element of receipt financing and expenditure financing. This research has the purpose to analyze the implementation of accounting in the region financing according to Government Regulation (PP) No.71 Year 2010 in Southeast Minahasa regency. Analyzing method used is quantitative descriptive method where the research was done with collected and analyzed the obtained data and provided information in any case findings. The results showed that the application of financing accounting area in Southeast Minahasa regency is broadly in accordance with PP No.71 Year 2010, pointed out by the budget realization report which are one of the financial report components according to PP No.71 Year 2010, so that its journal has recorded. But there was weakness found in the budget realization report data, where there were some transaction that have been realized which were not budgeted before. It is needed an increase in performance that is better for evaluating the recording budget realization report, and it should be an explanation of each entity in every receipts and expenditures in the notes to the statements of cash.

Keywords: receipt financing, expenditure financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peranan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perludi bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup devisit maupun memanfaatkan surplus. Tujuan dari pembiayaan daerah adalah untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja. Laporan realisasi anggaran terdapat dua entitas pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran yaitu penerimaan pembiayaan yang berupa penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, pinjaman dan atau penerimaan lainnya, dan pengeluaran pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pembayaran dan atau pemberian lainnya.

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengelolaan keuangan dan aset daerahnya secara langsung di kelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), salah satunya memiliki tugas umum dibidang akuntansi pembiayaan yang mengelola pembiayaan daerah yaitu seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran. Yang menjadi alasan mengapa penulis melakukan penelitian pada DPPKAD mitra karena pengelolaan proses akuntansi pembiayaan untuk daerah mitra tidak terdapat pada skpd melainkan hanya pada skpd yaitu DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan Daerah berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:2) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah penerapan dan perlakuan akuntansi pada suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Bastian (2006:15) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.

Akuntansi

PP RI No.71 Tahun 2010 mendefinisikan Akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi (2012:36) menyatakan bahwa fungsi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan benar diantara pelbagai alternatif arah tindakan. Kieso, dkk (2008:2) mendefinisikan Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintah

Permendagri No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bahtiar, dkk (2009:11) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah sebagai suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atau informasi keuangan tersebut. Mardiasmo (2009:24) menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintah merupakan aktiitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Sistem Akuntansi Pemerintah

Reeve, dkk (2009:223) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai suatu metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Mahmudi (2010:19-20) mendefinisikan sistem akuntansi daerah sebagai suatu kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam sistem subsistem terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah, yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
2. Mendukung operasi rutin harian;
3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan;
5. Meningkatkan akuntabilitas finansial;
6. Melindungi aset pemerintah daerah.

Laporan Keuangan

Bastian (2006:213) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Mahmudi (2010:2) menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan untuk mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

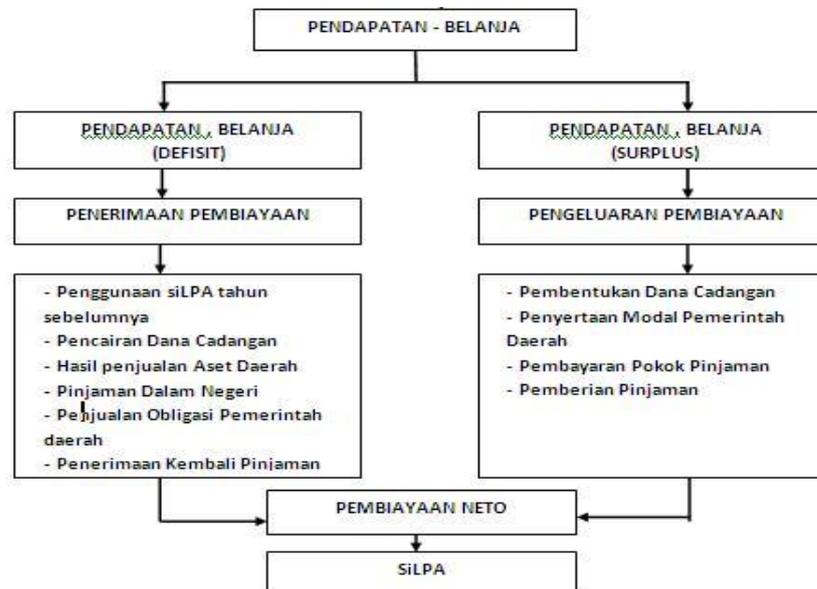
Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Mahmudi (2010:68) menjelaskan aturan mengenai penyajian elemen laporan keuangan juga bisa merujuk pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Namun tidak berarti semua pos harus ada nilainya. Jika pos tertentu tidak perlu dipaksakan untuk diisi nilainya dan disajikan dalam laporan keuangan. PP. No.71 Tahun 2010 Lampiran II komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah (No.1 Paragraph 14), mengatur:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan.

Pembiayaan

PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan / memanfaatkan surplus anggaran. Tanjung (2009:386) menjelaskan tujuan dari pembiayaan daerah yaitu untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja.



Gambar 1. Ilustrasi Pembiayaan

Sumber: Buku analisis laporan keuangan

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

PP No.71 Tahun 2010 (paragraph 51) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan penerimaan pembiayaan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Halim dan Kusufi (2012:111) Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan berikut ini:

1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Penerimaan Pinjaman Daerah
4. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah
6. Hasil Penjualan kekayaan daerah

Akuntansi Pembiayaan Pengeluaran

PP No.71 Tahun 2010 (paragraph 55) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan pengeluaran pembiayaan sebagai semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Halim dan Kusufi (2012:111) mengelompokkan pengeluaran pembiayaan daerah ke dalam beberapa jenis:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)
3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman Daerah.

Penelitian Terdahulu

Sumarow (2014) melakukan penelitian mengenai analisis sistem dan prosedur akuntansi pembiayaan pada pemerintah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di pemerintah Kota Manado sesuai dengan Permendagri No.58 Tahun 2008, serta bagaimana perlakuan atas akuntansi pembiayaan di pemerintah Kota Manado yang baik dan benar sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada BPK-BMD sudah sesuai dengan Permendagri No.58 Tahun 2008, namun masih terdapat hambatan dari segi waktu, dan untuk akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan mulai dari pengakuan, pencatatan, pengungkapan secara garis besar juga ditemukan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II. Penelitian oleh Sumarow dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan penelitian mengenai akuntansi pembiayaan, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti di atas hanya meneliti perlakuan atas akuntansi pembiayaan, sedangkan peneliti melakukan analisis mengenai penerapannya pada objek yang berbeda.

Mawei (2012) melakukan penelitian mengenai analisis sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan dan prosedur pengeluaran kas berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan prosedur pengeluaran kas yang diterapkan secara umum sudah mengikuti ketentuan Permendagri No.13 tahun 2006. Penelitian oleh Mawei dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni penelitian ini juga melakukan analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian dilakukan di objek yang berbeda dan mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Indriantoro dan Supomo (2012:26) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini mengambil tempat di DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara. Proses penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, pada bulan Maret sampai dengan Mei 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah yang ditemui untuk kemudian dapat diteliti dan dicari solusinya.
2. Mengajukan Permohonan Penelitian dengan cara memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang dipakai dalam penyusunan skripsi.
3. Disposisi Pimpinan Instansi yaitu setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama, menindak lanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan pimpinan instansi.
4. Pengumpulan informasi dengan mencari berbagai literatur dari berbagai sumber, seperti di perpustakaan, yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti, demi lancarnya proses penyusunan skripsi ini. Juga, melalui media elektronik, berupa akses data dalam internet untuk melengkapi teori-teori yang ada untuk lebih memahami permasalahan yang ditemui.
5. Mencari data secara langsung yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
6. Melakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan mengkaji kembali apakah sesuai dengan teori-teori yang telah ada.
7. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dari penulis sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, apakah permasalahan yang telah dibahas tersebut memiliki dampak bagi perusahaan itu sendiri.
8. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara.

Metode Pengumpulan data

Jenis Data

Kuncoro (2009:145) mengelompokkan data kedalam dua jenis: data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait dengan /data-data akuntansi pembiayaan serta gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi dan tujuan dan sasaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Minahasa Tenggara tahun 2010 – 2013.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2012:146-147) membagi data berdasarkan sumbernya menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara, dan
2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan di tempat penelitian.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penyediaan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung keperluan penelitian.
3. Penelitian Lapangan, melalui penelitian ini dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan yang sebenarnya.

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Memperoleh gambaran umum dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mempelajari data yang diterima dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
4. Mengolah data yang diterima dari DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
5. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada.
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan di DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara selama 4 (empat) tahun (2010-2013) dapat di lihat pada tabel laporan realisasi anggaran berikut ini, yaitu :

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2010	Penggunaan SILPA	Rp. 30.447.448.821,14	Rp. 29.643.674.419,69	97,26
2011	Penggunaan SILPA	Rp. 57.748.969.883,94	Rp. 57.748.969.883,94	100
2012	Penggunaan SILPA	Rp. 36.912.809.061,05	Rp. 36.912.809.061,05	100
2013	Penggunaan SILPA	Rp. 13.062.999.440,05	Rp. 13.062.999.440,05	100

Sumber: DPPKAD Kab. Minahasa Tenggara 2014

Tabel 1 di atas dapat di lihat bahwa penerimaan pembiayaan di DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk penggunaan SILPA selama 4 (empat) tahun mengalami penurunan pada tahun anggaran 2010, dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Saat penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan SILPA, Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah membuat jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan tersebut yaitu :

Tabel 2. Jurnal Penerimaan Pembiayaan

Tahun	Keterangan	Debit	Kredit
2010	SILPA	Rp. 29.643.674.419,69	
	Efisiensi Belanja atau akibat lain uang jaminan		Rp. 29.643.674.419,69
2011	SILPA	Rp. 57.748.969.883,94	
	Efisiensi Belanja atau akibat lain uang jaminan		Rp. 57.748.969.883,94
2012	SILPA	Rp. 36.912.809.061,05	
	Efisiensi Belanja atau akibat lain uang jaminan		Rp. 36.912.809.061,05
2013	SILPA	Rp. 13.062.999.440,05	
	Efisiensi Belanja atau akibat lain uang jaminan		Rp. 13.062.999.440,05

Sumber: DPPKAD Kab. Minahasa Tenggara 2014

Table 2 di atas, penerimaan pembiayaan di DPPKAD memiliki SILPA yang cukup relatif besar dalam nilai dan jumlahnya, terlebih lagi untuk penggunaan SILPA tahun anggaran 2011. PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah, dan diakui pada saat di terima pada rekening kas umum Negara/daerah, oleh karena itu pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk penerimaan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II karena penerimaan pembiayaan untuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya telah berhasil direalisasikan dan dibuat jurnal sebagai bentuk jurnal pengakuan SILPA tahun sebelumnya, sehingga diterima langsung pada rekening kas umum daerah.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama 4 (empat) tahun (2010-2013) dapat di lihat pada tabel laporan realisasi anggaran berikut ini, yaitu :

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2010	Pembayaran pokok utang	Rp. 0,00	Rp. 23.656.302.156,00	0,00
2011	Pembayaran pokok utang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
2012	Pembayaran pokok utang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
2013	Pembayaran pokok utang	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00

Sumber: DPPKAD Kab. Minahasa Tenggara 2014

Tabel 3 di atas dapat dilihat dengan jelas pengeluaran pembiayaan di DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa hanya pada tahun anggaran 2010 yang memiliki entitas pengeluaran pembiayaan, sedangkan untuk tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013 tidak memiliki nilai atau jumlah dalam laporan realisasi anggaran, yang berarti pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak ada aktivitas pengeluaran untuk pembayaran pokok utang selama tiga tahun tersebut. Pada tahun anggaran 2010 terlihat bahwa tidak ada nilai atau jumlah yang menjadi target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat perolehan realisasi pembayaran pokok utang sebesar Rp. 23.656.302.156,00 dengan persentase 0%, ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mengalokasikan adanya pembayaran pokok utang pada tahun 2010, namun tiba-tiba terjadi pembayaran kewajiban. Pada saat pengeluaran pembiayaan yaitu pembayaran pokok utang terealisasi pada tahun anggaran 2010, DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara membuat jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan tersebut yaitu :

Tabel 4. Jurnal Pengeluaran Pembiayaan

Tahun	Keterangan	Debit	Kredit
2010	Pembayaran pokok utang	Rp. 23.656.302.156,00	
	Kas di kas daerah		Rp. 23.656.302.156,00

Sumber: DPPKAD Kab. Minahasa Tenggara 2014

Tabel 4 di atas, Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013 tidak memiliki pembayaran pokok utang, sehingga DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mengeluarkan jurnal. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun anggaran 2010 merupakan akibat dari penerimaan tahun – tahun sebelumnya yang harus di bayarkan di tahun berikutnya.

Pembahasan

Analisis Terhadap Penerimaan Pembiayaan

Sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah, oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian untuk penerimaan pembiayaan, secara garis besar telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, terlihat dari adanya pembuatan laporan keuangan, sebagai salah satu bukti telah membuat laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan, dan telah melakukan pencatatan jurnal. Namun pada catatan atas laporan kas di DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara tidak menjelaskan kenapa pada pos SILPA tahun anggaran 2010 tidak di anggarkan sepenuhnya dalam penerimaan pembiayaan yaitu untuk penggunaan SILPA tahun anggaran 2011.

Terlihat dari hasil penelitian dan data yang ada jika di dibandingkan pelaporan keuangan penerimaan pembiayaan selama empat tahun yaitu tahun anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013, bahwa untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2011 lebih besar penggunaan SILPA yang pakai di dibandingkan dengan tahun anggaran 2010, 2012, dan 2013. Dan kinerja keuangan untuk penerimaan pembiayaan terlihat cukup berhasil dilakukan, di karenakan penggunaan SILPA mampu merealisasikan dana sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013. Walaupun pada tahun anggaran 2010 belum mencapai

target namun hampir mendekati dengan target anggaran yang di telah ditetapkan dengan kata lain presentase pencapaian atas realisasi tidak begitu jauh dari yang di anggarakan.

Analisis Terhadap Pengeluaran Pembiayaan

PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini berarti juga bahwa pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Minahasa Tenggara secara garis besar telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, terlihat bahwa entitas pengeluaran pembiayaan pada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pembayaran pokok utang/pinjaman, yang terdapat pada pengeluaran pembiayaan di PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, dan telah dimunculkan di laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, sehingga telah di buat pencatatan jurnalnya, dan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, yang berarti telah diakui.

Sumarow (2014) melakukan penelitian yang sama pada Pemerintah Kota Manado dengan hasil penelitian meski masih terdapat beberapa hambatan, tapi selebihnya akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mulai dari pengakuan, pencatatan, pengungkapan secara garis besar telah ditemukan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II, hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana meski terdapat hambatan dalam hal ini ditemukan beberapa transaksi yang tidak dianggarkan pemerintah, namun penerapan akuntansi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara sudah didapati sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Lampiran II

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penerapan akuntansi untuk pembiayaan daerah pada pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, meski ada beberapa kelemahan dalam transaksi pembiayaan, yaitu seperti untuk penerimaan pembiayaan tidak terpakai atau tidak teranggarkan semua sisa jumlah dari SILPA tahun sebelumnya, dan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pembayaran pokok utang yang dicatat terealisasikan di laporan keuangan namun pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mencatat target anggaran yang ditetapkan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi lebih baik untuk melakukan evaluasi kembali dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi pada setiap entitas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam laporan keuangan, serta nilai dan jumlah yang di catat dalam laporan realisasi anggaran.
2. Pencatatan atas laporan kas sebaiknya disertakan dengan penjelasan, sehingga pemahaman teknis tentang akuntansi pembiayaan terlihat dan dapat dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* edisi 1. BPF, Yogyakarta.
- Kieso, Donald, E. Weygandt, Jerry, J. Warfield, Terry, D. 2008. *Akuntansi Intermediate* Edisi Keduabelas Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi 2. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mawei, Melisa. 2012. Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado. *Skripsi*. (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 66-75.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Reeve, James M., Carl S. Warren, Jhonathan E. Duchac, Ersya Try Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abdi Jusuf, Chaerul D. Djakma. 2008. *Pengantar Akuntansi buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarow, Rizkianty. 2014. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Manado. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 2. No.1 Maret 2014. <http://ejournalunsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4352/3881>. Diakses: 18 Agustus 2014. Hal. 576-579.
- Tanjung, Abdul Hafis. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.